

**PENGARUH ALOKASI BELANJA MODAL,  
KEMISKINAN, DAN PRODUK DOMESTIK  
REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SERTA  
EVALUASI KINERJA PEMERINTAHAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

**SINDHU KARNO PRASETYANTO**

**NIM. 12020112140077**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2016**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Sindhu Karno Prasetyanto  
Nomor Induk Mahasiswa : 12020112140077  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ IESP  
Judul Usulan : **PENGARUH ALOKASI BELANJA MODAL,  
KEMISKINAN, DAN PRODUK DOMESTIK  
REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SERTA  
EVALUASI KINERJA PEMERINTAHAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**  
Dosen Pembimbing : Nenek Woyanti, S.E., M.Si.

Semarang, 14 November 2016

Dosen Pembimbing,

(Nenek Woyanti, S.E., M.Si)

NIP. 196905121994032003

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Sindhu Karno Prasetyanto  
Nomor Induk Mahasiswa : 12020112140077  
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ IESP  
Judul Skripsi : **PENGARUH ALOKASI BELANJA MODAL,  
KEMISKINAN, DAN PRODUK DOMESTIK  
REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SERTA  
EVALUASI KINERJA PEMERINTAHAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 5 Desember 2016**

Tim Penguji

1. Nenek Woyanti, S.E., M.Si (.....)
2. Prof Dr. Purbayu Budi Santosa, MS (.....)
3. Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP (.....)

Mengetahui

Pembantu Dekan I,

(Anis Chariri, SE., M.Com., Ph.D., Akt.)

NIP. 19670809 199203 1001

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Sindhu Karno Prasetyanto, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Kemiskinan, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kesejahteraan Masyarakat serta Evaluasi Kinerja Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 14 November 2016

Yang membuat pernyataan

(Sindhu Karno Prasetyanto)

NIM: 12020112140077

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Cukuplah Allah sebagai penolong kami. Dan Allah adalah sebaik-baik pelindung (QS Al – Imran : 173)

“Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses. Tuhan hanya menyuruh kita berjuang tanpa henti.” (Emha Ainun Najib)

“ Aja Kuminter Mundak Keblinger, Aja Cidra Mundak Cilaka ”  
(Filosofi Jawa)

“ I like to push myself beyond the limit every now and again ”  
(Judi Dench)

Skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak, Ibu, adik, saudara, dan orang yang terkasih dalam hidupku.

## ABSTRACT

*This research aims to analyze the impact of the capital expenditure, poverty, and Gross Domestik Regional Bruto toward social welfare of 35 districts/cities in Central Java Province for five-year (2010-2014) and performance evaluation of Central Java Provincial Government in achieving its vision. The method used in this research is panel data approach Fixed effects model with dummy variabel, and analysis of data between the achievements of the targets and comparison with national and regional conditions, using secondary data types.*

*The findings of this study indicate that the capital expenditure, poverty, and regional economic performance significant effect on social walfare districts/cities in Central Java Province*

*The Evaluation results concluded that, the capital expenditure Central Java Provincial Government and social welfare rose. However, Government of Central Java Province still Facing challenges that need attention to achieve its vision to improve the social welfare of the Central Java community*

***Keywords: Capital Expenditure, Poverty, Gross Domestik Regional Bruto, social Welfare, and Budget Policy***

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh alokasi belanja modal, kemiskinan, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kesejahteraan masyarakat pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun periode pelaksanaan, yaitu dari tahun 2010-2014 serta evaluasi Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam meraih visi-nya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel data dengan pendekatan model efek tetap (*fixed effect model*) dengan menggunakan *dummy*, dan analisis data antara capaian hasil dengan target dan perbandingan dengan kondisi nasional dan regional, dengan menggunakan jenis data sekunder.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi belanja modal, kemiskinan, dan kinerja ekonomi regional berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

Hasil evaluasi menyimpulkan bahwa, kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan indikator-indikator kesejahteraan masyarakat mengalami kenaikan. Meskipun demikian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ternyata masih menghadapi tantangan-tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam kerangka meraih visinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

**Kata Kunci : Belanja Modal, Kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto, Kesejahteraan Masyarakat, dan Kebijakan Anggaran**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmah dan hidayahnya serta shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan barokahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Kemiskinan, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kesejahteraan Masyarakat serta Evaluasi Kinerja Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.

Penulis menyadari bahwa bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak sangat berarti dalam penulisan skripsi ini. Sehubungan dengan hal tersebut penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Dr. Suharnomo, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Akhmad Syakir Kurnia, S.E., M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Ibu Nenek Woyanti S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing skripsi atas waktu, perhatian, arahan, dan kesabaran dalam membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Dr. Hadi Sasana S.E., M.Si selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi selama perkuliahan.

5. Semua dosen, jajaran staff, petugas FEB UNDIP yang telah memberikan ilmu dan fasilitas selama penulis menjalani masa perkuliahan.
6. Kepada kedua orang tua Bapak Slamet, Ak dan Ibu Ryta Rakhmisari S.Pd. Serta adikku Sukma Wening Nastitisari dan Seno Adji Jovanka yang selalu memberikan doa, kasih sayang, perhatian, kebersamaan, semangat, dan dorongan baik secara moril maupun materiil
7. Kepada saudara-saudara dalam Keluarga besar Bapak Wage serta Keluarga Sarko Endroprabowo yang telah memberikan doa serta bantuan selama penulis menjalani perkuliahan.
8. Bapak Soemarno, S.E., M.M selaku Kepala Bagian Anggaran dan staff Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah yang memberikan bantuan berupa data dan informasi selama penulis magang maupun skripsi.
9. Sahabat-sahabatku Wisnu, Fauzan, Brain, Shihab, Erwin, Ferry, Yugo, Danny, Anggoro, Arva, Haikal, Yassir, Debik, Adit, Jordy, Zaki. Terima kasih atas bantuan, canda tawa, dan pengalaman yang tak terlupakan.
10. Keluarga besar IESP 2012, terimakasih atas semangat, motivasi, kerjasama, suka, dan canda tawa serta telah menemani melewati masa perkuliahan.

Semarang, 14 November 2016

Penulis

Sindhu Karno Prasetyanto

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	20
1.3. Tujuan dan Kegunaan.....	22
1.3.1. Tujuan .....	22
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	23
1.4 Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
2.1 Landasan Teori .....	25
2.1.1 Peran Pemerintah dalam Perekonomian .....	25
2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	28
2.1.3 Pengeluaran Pemerintah.....	30
2.1.3.1 Hukum Aldof Wagner tentang Teori Pengeluaran Pemerintah.....	31
2.1.3.2 Teori Erick Lindahl tentang Pengeluaran Pemerintah...33	33
2.1.3.3 Teori Makro tentang Pengeluaran Pemerintah.....35	35
2.1.4 Perencanaan Pembangunan Daerah .....	36

2.1.5 Konsep Kemiskinan .....	42
2.1.6 Kesejahteraan Masyarakat .....	45
2.1.6.1 Komponen Indeks Pembangunan Manusia.....	48
2.1.6.2 Angka Harapan Hidup Saat Lahir - HHH.....	50
2.1.6.3 Rata-Rata Lama Sekolah - RLS.....	50
2.1.6.4 Angka Harapan Lama Sekolah - HLS.....	51
2.1.6.5 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan.....	51
2.1.7 Produk Domestik Regional Bruto.....	51
2.1.8 Hubungan Antara Kebijakan APBD dengan Kesejahteraan Masyarakat.....	53
2.1.9 Hubungan Antara Kemiskinan dengan Kesejahteraan Masyarakat.....	56
2.1.10 Hubungan Antara Kinerja Ekonomi Regional dengan Kesejahteraan Masyarakat .....	57
2.2 Penelitian Terdahulu .....	59
2.3 Kerangka Berpikir .....	64
2.4 Hipotesis .....	66
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>67</b>
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	67
3.1.1 Variabel Penelitian .....	67
3.1.2 Definisi Operasional Variabel.....	68
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	69
3.3.1 Jenis Data .....	69
3.3.2 Sumber Data.....	70
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	71
3.5 Metode Analisis Data .....	71
3.5.1 Estimasi Model Regresi .....	74
3.5.1.1 Estimasi Model Regresi Panel Data dengan Penggunaan Variabel Dummy.....	76
3.5.2 Deteksi Asumsi Klasik.....	79
3.5.2.1 Deteksi Normalitas.....	79
3.5.2.2 Deteksi Multikolinearitas.....	80
3.5.2.3 Deteksi Heteroskedastisitas.....	80
3.5.2.4 Deteksi Autokorelasi.....	81

3.5.3 Pengujian Statistik.....	83
3.5.3.1 Uji Koefisien Determinasi (Uji $R^2$ ).....	83
3.5.3.2 Koefisien Regresi Secara Partial (Uji t).....	84
3.5.3.3 Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F).....	85
3.6 Metode Evaluasi Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah .....	86
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	87
4.1 Deskripsi Penelitian.....	87
4.1.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah.....	87
4.1.2 Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah .....	88
4.1.3 Kemiskinan di Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.....	90
4.1.4 Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. ....	92
4.1.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.....	94
4.2 Analisis Data .....	95
4.2.1 Pengujian Untuk Memilih Pendekatan Data Panel Terbaik.....	95
4.2.2 Deteksi Asumsi Klasik.....	96
4.2.2.1 Deteksi Normalitas.....	96
4.2.2.2 Deteksi Multikolinearitas.....	97
4.2.2.3 Deteksi Heteroskedastisitas.....	98
4.2.2.4 Deteksi Autokorelasi.....	98
4.2.3 Pengujian Statistik.....	100
4.2.3.1 Pengujian Hipotesis.....	100
4.3 Interpretasi Hasil .....	102
4.4 Evaluasi Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.....	107
4.4.1 Kebijakan APBD Provinsi Jawa Tengah .....	108
4.4.2 Capain Kinerja Kesejahteraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah... ..	118
4.4.2.1 Human Development Indeks (HDI)/ Indeks Pembangunan Manusia.....	119
4.4.2.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah.....	122
4.4.2.3 Laju Inflasi Provinsi Jawa Tengah.....	126
4.4.2.4 PDRB Per Kapita.....	128

4.4.2.5 Indeks Gini.....	129
4.4.2.6 Kemiskinan Penduduk Provinsi Jawa Tengah.....	131
4.4.2.7 Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT).....	132
4.4.2.8 Nilai Tukar Petani (NTP).....	134
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>136</b>
5.1 Simpulan.....	136
5.2 Keterbatasan .....	137
5.3 Saran .....	138
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>140</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>144</b>

## Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi se Jawa dan Nasional Tahun 2010-2010.....	6
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah .....	8
Tabel 1.3 Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah dan Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2014 .....	13
Tabel 1.4 Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006-2015 .....	15
Tabel 1.5 Capaian Indikator Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015 .....	18
Tabel 2.1 Tahapan, Kegiatan, dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah ....	37
Tabel 2.2 Perbandingan Perhitungan Indeks Pembangunan (IPM) Metode Lama dan Metode Baru .....	49
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu .....	60
Tabel 4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014 .....	89
Tabel 4.2 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014 .....	91
Tabel 4.3 Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014 .....	93
Tabel 4.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014 .....	94
Tabel 4.5 <i>Redundant Test</i> .....	95
Tabel 4.6 Uji Hausman .....	96
Tabel 4.7 Deteksi Normalitas .....	97
Tabel 4.8 Deteksi Multikolinearitas .....	97
Tabel 4.9 Deteksi Heteroskedastisitas .....	98
Tabel 4.10 Hasil Uji F .....	101
Tabel 4.11 Nilai t-statistik .....	102
Tabel 4.12 Perkembangan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2015.....	109
Tabel 4.13 Alokasi Belanja Menurut Jenis Belanja APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2015 .....	111
Tabel 4.14 Alokasi Belanja Menurut Sifat Belanja APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2015 .....	114
Tabel 4.15 Alokasi Belanja pada Sektor Strategis APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2015 .....	117
Tabel 4.16 Alokasi Belanja pada Sektor Pertanian APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2015 .....	118
Tabel 4.17 Capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah Dibandingkan RPJMD, Provinsi lain, dan Nasional	

Tahun 2010-2015.....	121
Tabel 4.18 Komponen IPM Provinsi Jawa Tengah Dibandingkan RPJMD, Provinsi lain, dan Nasional Tahun 2015 .....	122
Tabel 4.19 Capaian Pertumbuhan PDRB (ADHK) Provinsi Jawa Tengah Dibandingkan RPJMD, Provinsi lain, dan Nasional Tahun 2010-2015.....	124
Tabel 4.20 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha 2011-2015.....	125
Tabel 4.21 Distribusi PDRB Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2011-2015 .....	126
Tabel 4.22 Laju Inflasi Provinsi Jawa Tengah Dibandingkan RPJMD, Provinsi lain, dan Nasional Tahun 2010-2015 .....	127
Tabel 4.23 PDRB Per-kapita (ADHB) Provinsi Jawa Tengah Dibandingkan RPJMD, Provinsi lain, dan Nasional Tahun 2010-2015 .....	129
Tabel 4.24 Indeks GINI Provinsi Jawa Tengah Dibandingkan RPJMD, Provinsi lain, dan Nasional Tahun 2010-2015 .....	130
Tabel 4.25 Presentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Dibandingkan RPJMD, Provinsi lain, dan Nasional Tahun 2010-2015 .....	132
Tabel 4.26 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah Dibandingkan RPJMD, Provinsi lain, dan Nasional Tahun 2010-2015 .....	134
Tabel 4.27 Nilai Tukar Pertanian (NTP) Provinsi Jawa Tengah Dibandingkan RPJMD, Provinsi lain, dan Nasional Tahun 2010-2015 .....	135

## Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah dan Nasional 2008 2015.....	7
Gambar 2.1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner .....	33
Gambar 2.2 Kurva Indifferent .....	34
Gambar 2.3 Solusi Erick Lindahl .....	35
Gambar 2.4 Alur Hubungan Antara Kinerja Ekonomi Regional dengan Pembangunan Manusia .....	59
Gambar 3.1 Kriteria Pengujian Durbin-Watson .....	82
Gambar 4.1 Deteksi Autokorelasi .....	99
Gambar 4.2 Perkembangan IPM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015 .....	120
Gambar 4.3 Pertumbuhan PDRB (ADHK 2010) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015 .....	123
Gambar 4.4 Perkembangan Inflasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015 .....	127
Gambar 4.5 Perkembangan PDRB Per-kapita (ADHB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015 .....	128
Gambar 4.6 Perkembangan Indek GINI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015 .....	130
Gambar 4.7 Presentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2010.....	131
Gambar 4.8 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015 .....	133
Gambar 4.9 Perkembangan Nilai Tukar Pertanian (NTP) Provinsi Jawa Tengah 2010-2015 .....	135

## Daftar Lampiran

	Halaman
Lampiran A <i>Redundant Test</i> .....	144
Lampiran B Uji Hausman.....	145
Lampiran C Deteksi Normalitas.....	146
Lampiran D Deteksi Multikolinearitas.....	146
Lampiran E Deteksi Heteroskedastisitas.....	147
Lampiran F Hasil Estimasi FEM menggunakan Variabel Dummy (LSDV).....	148
Lampiran G Data Mentah.....	150
Lampiran H Peta Jawa Tengah.....	157

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun Pemerintah Negara Indonesia secara hirarkis berjenjang dari mulai Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota), dan Pemerintah Desa. Tujuan memajukan kesejahteraan umum atau masyarakat yang menjadi tekad dalam penyelenggaraan pemerintahan, diterapkan dalam suatu Sistem Pemerintah yang telah mengalami pasang surut sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai saat ini. Pada orde lama hingga orde baru, sistem pemerintahan lebih cenderung tersentralistik, kemudian melalui pergerakan reformasi pada Tahun 1998 sistem pemerintahan berajak menjadi lebih terdesentralisasi.

Sistem desentralisasi atau dikenal dengan otonomi daerah yang menjadi tuntutan reformasi mulai diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam perjalanan waktu, kedua UU tersebut kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Saat ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah kembali diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang tidak lain merupakan tekad dan semangat untuk tetap dan bahkan lebih memantapkan politik desentralisasi yang dikenal dengan Otonomi Daerah. Politik desentralisasi menegaskan bahwa Pemerintah Pusat menyerahkan kewenangan kepada Pemerintah Daerah semua urusan pemerintahan kecuali urusan yang bersifat absolut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, pendidikan, moneter dan fiskal nasional serta agama.

Di bidang Keuangan, desentralisasi keuangan daerah diwujudkan dengan berlakunya UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang kemudian disempurnakan oleh UU No 33 Tahun 2004, kemudian disusul Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut ketentuan tersebut, maka Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) diberi kewenangan untuk mengatur pengelolaan keuangannya sendiri dengan harapan dapat menciptakan inisiatif dan kreativitas lokal dalam mengelola sumber-sumber ekonomi di wilayahnya. Tujuan otonomi daerah dalam kerangka meraih tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi amanat tegas dan lugas dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Melalui pemberian kewenangan otonomi yang seluas-luasnya, diharapkan terpacu memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing,

dan kreativitas Daerah di tingkat lokal guna mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Penerapan otonomi daerah tersebut, tidak lantas membuat daerah sesukanya menggunakan sumber-sumber daya ekonomi yang daerah miliki. Guna menjamin bahwa konsep otonomi mampu mencapai tujuan yang dikehendaki maka ada tuntutan agar penyelenggaraan pemerintahan termasuk pemerintah daerah menganut konsep modern dengan istilah *Good Governance*. Jika mengacu pada world bank, *Good Governance* diartikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Tujuan otonomi daerah untuk mensejahterakan masyarakat dalam tataran cita-cita atau kehendak secara nyata telah dijadikan rumusan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah. Pada era kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2008–2013 (Bibit Waluyo dan Rustriningsih) dicanangkan visi: ***“Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera”*** (Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2008-2013). Demikian pula pada era berikutnya, kepemimpinan Gubernur

dan Wakil Gubernur (Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko), dicanangkan Visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018: **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari - Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi.** (Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah).

Pengertian kesejahteraan rakyat mengandung dimensi yang sangat luas dan kompleks. Dimensi secara umum, kesejahteraan manusia mencakup sejahtera secara fisik dan rohani, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Dalam persepektif secara geo politik, kesejahteraan meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial pasal 2 ayat 1, adalah: “Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila”.

Dari dimensi pembangunan, berbagai konsepsi kesejahteraan masyarakat juga banyak diketengahkan, melalui berbagai cara penilaian taraf kesejahteraan rakyat dan melalui indikator-indikator terukur dari capaian hasil pembangunan. Sejak tahun 1990, Badan Dunia UNDP (*United Nations Development Programme*) mengadopsi suatu paradigma baru mengenai pembangunan yang

disebut Paradigma Pembangunan Manusia (PPM), paradigma ini melihat manusia dari sisi yang lebih kompleks dan komprehensif karena disamping memperhitungkan keberhasilan pembangunan manusia dari aspek ekonomi, juga memperhitungkan keberhasilan pembangunan manusia dari aspek non-ekonomi. Berdasarkan konsep tersebut, pembangunan manusia berarti meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam arti yang luas meliputi aspek jasmani dan rohani, material dan spiritual dalam skala individu maupun sosial yang pada akhirnya harus mampu menjadi sumber daya pembangunan secara komprehensif. Seperti halnya pembangunan ekonomi, pembangunan manusia memerlukan ketersediaan analisis data guna perencanaan dan pengambilan kebijakan agar tepat sasaran serta perlu dievaluasi sejauh mana pembangunan yang dilaksanakan mampu meningkatkan kualitas hidup manusia sebagai obyek pembangunan.

Salah satu alat ukur yang lazim digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks (HDI)*. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Selain itu IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Sehingga IPM merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018 (Perda Provinsi Jawa Tengah

Nomor 5 Tahun 2014), juga menggunakan indikator IPM sebagai indikator utama untuk mengukur target dan capaian kesejahteraan masyarakat

**Tabel 1.1**  
**Indeks Pembangunan Manusia Provinsi se Jawa dan Nasional**  
**Tahun 2010-2015**

Daerah \ Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indonesia	66,53	67,09	67,7	68,31	68,90	69,55
r(%) Indonesia	-	0,84%	0,91%	0,90%	0,86%	0,94%
Jawa Tengah	66,08	66,64	67,21	68,02	68,78	69,49
r(%) Jawa Tengah	-	0,85%	0,86%	1,21%	1,12%	1,03%
DIY	75,37	75,93	76,15	76,44	76,81	77,59
r(%) DIY	-	0,74%	0,29%	0,38%	0,48%	1,02%
DKI	76,31	76,98	77,53	78,08	78,39	78,99
r(%) DKI	-	0,88%	0,71%	0,71%	0,40%	0,77%
Jawa Timur	65,36	66,06	66,74	67,55	68,14	68,95
r(%) Jawa Timur	-	1,07%	1,03%	1,21%	0,87%	1,19%
Jawa Barat	66,15	66,67	67,32	68,25	68,80	69,50
r(%) Jawa Barat	-	0,79%	0,97%	1,38%	0,81%	1,02%
Banten	67,54	68,22	68,92	69,47	69,89	70,27
r(%) Banten	-	1,01%	1,03%	0,80%	0,60%	0,54%

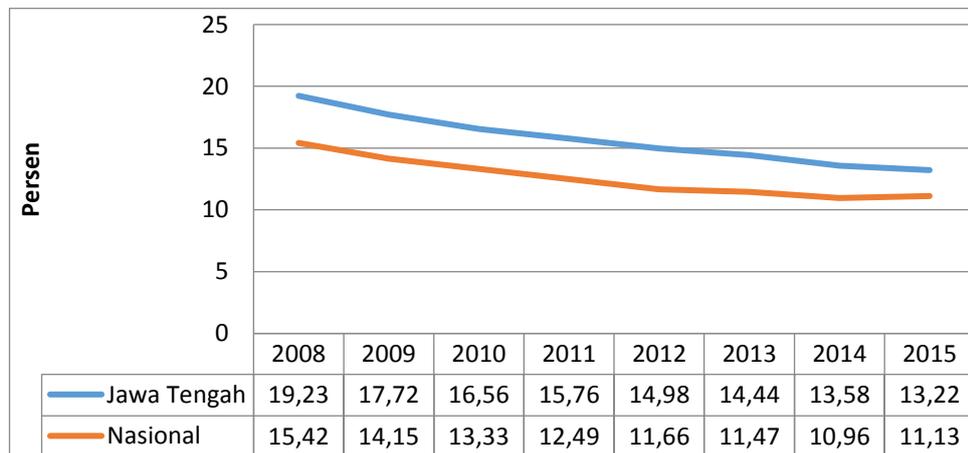
Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2010-2015, diolah

IPM Jawa Tengah berdasarkan Tabel 1.1 pada tahun 2010-2015 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun namun masih berada dibawah IPM Nasional. Selain itu, jika mengacu pada data terakhir yaitu tahun 2015. Peringkat IPM Provinsi Jawa Tengah berada di posisi 5 diantara 6 Provinsi di Jawa dan hanya berada diatas Jawa Timur. Hal tersebut menunjukkan perlunya pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperbaiki dan menaikkan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah secara lebih akseleratif, sehingga dapat meningkat dan tidak tertinggal dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Jawa.

Perkembangan IPM Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ternyata belum diimbangi dengan penurunan tingkat penduduk miskin di Jawa Tengah yang masih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat

penduduk miskin nasional. Padahal tingkat kemiskinan menjadi salah satu faktor penting bagi pembangunan manusia karena kemiskinan bermula dari ketidakmampuan seorang individu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan pendidikan dan kesehatan terabaikan. Hal tersebut membuat target IPM yang di inginkan pemerintah tidak dapat tercapai karena masih besarnya jumlah penduduk miskin.

**Gambar 1.1**  
**Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah dan Nasional 2008-2015**



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2015, diolah

Berdasarkan Gambar 1.1, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah dari tahun 2008 sampai 2015 terjadi penurunan. Namun demikian, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah masih relatif tinggi karena masih di atas rata-rata persentase penduduk miskin secara Nasional. Dengan masih tingginya penduduk miskin Jawa Tengah dibandingkan nasional, menunjukkan bahwa sumbangan penduduk miskin di Jawa Tengah secara nasional tergolong besar dan menjadi salah satu penyumbang terbesar jumlah penduduk miskin di Indonesia.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, dan Persentase Penduduk Miskin**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2015**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	r (%)	Garis kemiskinan per Bulan per Kapita (RP)	r(%)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2008	6.189,60	-	168.168	-	19,23
2009	5.725,70	-7,49%	182.515	8,53%	17,72
2010	5.217,20	-8,88%	192.435	5,44%	16,56
2011	5.107,96	-2,09%	217.440	12,99%	16,20
2012	4.863,40	-7,47%	233.769	7,51%	14,98
2013	4.811,30	-1,07%	261.881	12,03%	14,44
2014	4.561,82	-5,19%	281.570	7,52%	13,58
2015	4.505,78	-1,23%	309.314	9,85%	13,32

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2008-2015, diolah

Berkaca dari masih tingginya kemiskinan di Jawa Tengah diatas kemiskinan secara nasional, kondisi kemiskinan di Jawa Tengah secara garis besar terjadi penurunan. Hal tersebut terlihat berdasarkan Tabel 1.2 yang menggambarkan jumlah penduduk miskin, garis kemiskinan dan persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada tahun 2008-2014. Jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun terjadi penurunan yang ditunjukkan berdasarkan laju pertumbuhan penduduk miskin yang negatif. Sedangkan garis kemiskinan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yang menunjukkan semakin tingginya pendapatan minimum untuk memperoleh standar hidup yang layak. Dan persentase penduduk miskin yang menurun dari tahun ke tahun

Masih besarnya penduduk miskin di Jawa Tengah dan menjadi salah satu penyumbang penduduk miskin di Indonesia membuat Pemerintah Provinsi harus tanggap dalam membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat dapat menurunkan jumlah pendudukan miskin atau menggunakan istilah RPJMD Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2013 – 2018 kebijakan pembangunan daerah yang mengedepankan *pro poor* yaitu pendekatan pembangunan ekonomi yang lebih diarahkan pada keberpihakan kepada masyarakat miskin (masyarakat marginal).

Menurut Prasetyantoko dan Setyo (2012) dalam penelitian terkait konteks desentralisasi dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di enam daerah yaitu Sukabumi, Bandung, Kebumen, Gunungkidul, Jembrana, dan Makassar menunjukkan bahwa di enam daerah penelitian secara inkremental angka kemiskinan turun dari tahun ke tahun. Pada saat yang bersamaan, IPM keenam daerah mengalami peningkatan, kendati sering tidak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dalam studi tersebut didapatkan setidaknya tiga hal tumpuan kebijakan penanggulangan kemiskinan yaitu pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin, perlindungan sosial yang berorientasi pada pengurangan kerentanan dan memperkuat daya tahan warga, serta peningkatan pendapatan (penghasilan) keluarga miskin.

Peran pemerintah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia juga dapat berpengaruh melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu daerah. Peran pemerintah dalam kebijakan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah (Suyanto dalam Christy *et al*, 2009). Menurut Brata (2002) Pengaruh dari pembangunan manusia atau kualitas sumber daya

manusia terhadap PDRB secara empiris sudah banyak di kaji misalnya oleh Garcia dan Soelistianingsih (1998) serta Wibisono (2001).

. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam meraih tujuan menyejahterakan masyarakat secara tahunan (*annual*) dan berkesinambungan (*sustainable*) akan diimplementasikan dalam suatu instrumen yang dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai instrumen utama, APBD secara makro dapat berfungsi memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah dan yang lebih memberikan efek *multiplier* bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merata.

Menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD tidak hanya sekedar rencana keuangan daerah, tetapi juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah yang mencerminkan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah yang harus dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat serta didistribusikan secara patut dan adil. Sementara itu menurut Amir (dalam Riyanto, 2012) APBD merupakan kebijakan anggaran daerah yang dapat dilihat dalam ada dua perspektif yaitu : *Pertama*, perspektif mikro, APBD merupakan merupakan keputusan politik yang ditetapkan kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk dilaksanakan oleh aparat birokrasi daerah. *Kedua*, dalam perspektif makro yaitu tata pemerintahan demokrasi, APBD sebagai kebijakan anggaran daerah merupakan mandat politik warga (*citizen political mandate*) atas sumberdaya publik yang diamanatkan kepada lembaga pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif) sebagai pemilik otoritas pengelolaan anggaran. Sifat otoritatif tersebut

hanya berlaku sepanjang pemerintah daerah mampu melaksanakan alokasi atau distribusi anggaran berdasarkan nilai-nilai kepentingan warga. Atau dengan kata lain APBD harus dialokasikan untuk kepentingan publik daripada kepentingan aparat pemerintah. Namun demikian, realitasnya banyak APBD yang dibuat oleh pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan kepentingan publik atau masyarakat. Disamping itu APBD seringkali juga tidak mencerminkan penjabaran visi-misi dari RPJMD suatu daerah yang ingin di capai sebagaimana ketentuan UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebagai cerminan politik anggaran daerah suatu pemerintah daerah, alokasi APBD di banyak daerah masih banyak yang terserap untuk kepentingan aparatur pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari temuan dalam penelitian Riyanto (2012), dimana perbandingan alokasi anggaran belanja pegawai jauh dalam APBD lebih besar dibandingkan dengan belanja langsung yaitu belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Serta kecilnya alokasi belanja-belanja urusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat atau publik.

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilaksanakan. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat mengagalkan perencanaan yang disusun (Arniati dan Imelda, 2010).

Indikasi keberhasilan Otonomi Daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadaan tersebut dapat tercapai, salah satunya apabila manajemen keuangan (anggaran) dilaksanakan dengan baik (Kartiwa, 2004). Jelaslah bahwa APBD sebagai instrumen utama dalam meraih visi daerah (provinsi, Kabupaten, Kota) harus dibuat dalam proses perencanaan yang sehat, terpenuhi fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi ke dalam program dan kegiatan yang tepat, sehingga pada saat dilaksanakan dapat meraih tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, maka sudah semestinya dapat dibuktikan bahwa alokasi APBD ke dalam sektor-sektor, program/kegiatan dan jenis-jenis belanja dapat meningkatkan indikator-indikator kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Berdasarkan Tabel 1.3 yang menunjukkan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuatif namun cenderung naik. Hal tersebut terlihat dari terjadi penurunan total Pendapatan Daerah pada tahun 2014 yang disebabkan menurunnya penerimaan pendapatan di beberapa daerah. Sedangkan Realisasi Belanja Daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

**Tabel 1.3.**  
**Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah dan Kab/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2014 (dalam jutaan rupiah)**

Kab/Kota	PENDAPATAN					BELANJA				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
PROVINSI JAWA TENGAH	6.626.317	7.547.670	11.694.480	13.343.358	13.737.158	5.968.034	6.082.234	7.285.317	8.396.012	9.161.150
KAB BATANG	644.772	820.067	933.944	1.086.627	1.062.961	569.728	747.720	862.095	1.031.361	1.129.819
KAB BLORA	809.229	1.007.776	1.127.245	1.292.799	1.468.698	797.077	925.821	1.125.135	1.318.484	1.588.653
KAB BOYOLALI	917.899	1.096.014	1.271.240	1.463.130	1.569.313	909.091	1.098.880	1.266.276	1.421.737	1.624.300
KAB BANJARNEGARA	849.713	1.078.603	1.193.099	1.279.702	1.289.493	864.062	1.037.963	1.111.145	1.174.058	1.484.721
KAB BREBES	1.103.003	1.315.224	1.567.078	1.781.873	1.797.514	1.100.002	1.303.900	1.388.038	1.592.591	1.946.700
KAB BANYUMAS	1.221.546	1.593.406	1.815.453	2.037.636	2.113.895	1.178.380	1.476.266	1.732.236	2.018.053	2.360.375
KAB CILACAP	1.334.620	1.639.234	1.792.439	2.121.355	2.057.405	1.237.239	1.550.278	1.714.293	2.149.866	2.148.332
KAB DEMAK	851.907	1.132.136	1.209.429	1.398.722	1.361.270	825.295	1.052.911	1.207.868	1.338.188	1.425.443
KAB GROBOGAN	943.967	1.163.858	1.323.838	1.549.709	1.589.302	901.487	1.172.116	1.202.191	1.505.509	1.629.787
KAB JEPARA	902.872	1.170.173	1.304.004	1.386.692	1.484.144	852.318	1.095.749	1.257.038	1.352.329	1.604.163
KAB KARANGANYAR	874.554	1.043.598	1.228.675	1.369.052	1.466.049	876.227	978.181	1.171.206	1.285.164	1.657.432
KAB KEBUMEN	978.115	1.273.276	1.446.685	1.626.531	1.709.905	1.009.115	1.175.415	1.360.051	1.478.649	1.774.404
KAB KENDAL	901.334	1.136.759	1.158.345	1.388.636	1.456.424	908.118	1.109.886	1.163.989	1.270.621	1.574.524
KAB KLATEN	1.060.177	1.364.125	1.511.542	1.735.590	1.785.998	1.043.889	1.316.273	1.439.157	1.621.134	1.851.780
KAB KUDUS	837.477	1.005.233	1.147.303	1.386.183	1.517.236	903.109	947.776	1.147.953	1.151.172	1.677.595
KAB MAGELANG	954.275	1.114.475	1.311.902	1.428.243	1.464.759	972.057	1.061.734	1.146.500	1.258.155	1.824.742
KAB PATI	1.001.675	1.229.009	1.477.993	1.706.031	1.725.390	989.491	1.197.268	1.421.940	1.649.489	1.867.213
KAB PEKALONGAN	749.729	923.341	1.114.533	1.232.399	1.296.436	725.165	895.019	1.008.585	1.267.308	1.242.185
KAB PEMALANG	933.714	1.188.521	1.344.383	1.486.774	1.499.600	926.831	1.178.756	1.196.453	1.477.106	1.534.096
KAB PURBALINGGA	724.034	954.180	1.087.796	1.186.532	1.241.957	686.627	902.544	1.084.087	1.126.557	1.282.313
KAB PURWOREJO	802.215	1.013.075	1.012.296	1.289.038	1.369.486	815.860	968.311	1.123.314	1.154.350	1.446.552
KAB REMBANG	681.401	873.465	1.017.712	1.165.433	1.211.845	682.413	868.067	969.132	1.060.648	1.332.830

KAB SEMARANG	843.410	1.099.477	1.258.200	1.373.383	1.232.101	808.714	1.042.027	1.178.649	1.282.695	1.251.300
KAB SRAGEN	883.149	1.094.586	1.308.940	1.468.967	1.533.876	902.841	1.030.137	1.196.734	1.407.734	1.573.100
KAB SUKOHARJO	797.612	1.015.438	1.217.486	1.365.641	1.385.908	780.224	968.241	1.196.799	1.281.648	1.466.935
KAB TEGAL	946.107	1.204.378	1.354.748	1.574.069	1.708.553	959.765	1.115.789	1.347.310	1.531.862	1.763.845
KAB TEMANGGUNG	675.660	823.480	966.816	1.053.846	1 094 286	662.150	816.161	912.680	1.000.841	1.181.307
KAB WONOGIRI	981.561	1.166.580	1.339.809	1.489.308	1.538.389	963.984	1.091.699	1.302.179	1.424.757	1.623.949
KAB WONOSOBO	708.104	979.683	1.031.048	1.144.183	1.196.068	674.386	888.438	986.537	988.104	1.351.536
KOTA MAGELANG	401.911	505.439	579.717	634.760	658.206	410.623	469.412	536.349	630.851	689.960
KOTA PEKALONGAN	417.192	509.929	614.167	675.375	691.318	408.564	489.617	538.564	664.175	722.650
KOTA SALATIGA	411.504	478.174	562.324	603.204	643.028	418.616	458.618	551.635	529.238	767.710
KOTA SEMARANG	1.623.567	2.053.920	2.533.676	2.796.571	2.496.077	1.732.662	2.036.583	2.053.335	2.473.491	2.910.149
KOTA SURAKARTA	858.514	1.029.524	1.239.451	1.385.005	1.486.306	825.859	982.646	1.145.171	1.375.305	1.514.431
KOTA TEGAL	460.931	547.718	650.805	723.969	640.279	474.361	572.010	586.687	673.040	708.507
JUMLAH	36.713.769	45.191.542	54.748.602	62.030.326	61.002.203	35.764.364	42.104.442	47.916.629	54.362.283	62.294.488
PERSENTASE PERTUMBUHAN	-	23,09%	21,15%	13,30%	-1,66%	-	17,73%	13,80%	13,45%	14,59%

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2014, diolah

Kenaikan Belanja daerah tiap tahunnya yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, juga terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Sebagai provinsi dengan penduduk yang besar, pengelolaan APBD menjadi salah satu instrumen penting dalam mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam Tabel 1.4 yang menunjukkan pendapatan dan belanja pemerintahan provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2006-2014, secara umum terjadi kenaikan pendapatan maupun belanja pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Walaupun terjadi penurunan pada tahun 2007, namun untuk tahun selanjutnya hingga tahun 2014 terjadi peningkatan baik pendapatan maupun belanja Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel 1.4**  
**Pendapatan Dan Belanja Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun Anggaran 2006-2015 ( dalam jutaan rupiah)**

TAHUN	TOTAL PENDAPATAN	r(%)	TOTAL BELANJA	r(%)
2006	3.818.468	-	3.747.644	-
2007	2.932.796	-23,19%	3.039.935	-18,88%
2008	5.203.415	77,42%	5.162.662	69,83%
2009	5.696.660	9,48%	5.200.113	0,73%
2010	6.626.317	16,32%	5.968.034	14,77%
2011	7.547.670	13,90%	7.776.705	30,31%
2012	11.694.480	54,94%	11.446.844	47,19%
2013	13.343.358	14,10%	12.724.776	11,16%
2014	15.157.460	13,60%	15.086.065	18,56%
2015	16.782.169	10,72%	17.843.498	18,28%

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2015, diolah

Sebagai instrumen yang digunakan daerah untuk mendistribusikan pendapatan serta mengalokasikan dalam bentuk belanja, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diartikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah serta didistribusikan secara patut

dan adil. Pada kenyataannya, dengan realisasi Belanja Provinsi Jawa Tengah yang dari tahun ke tahun terus meningkat, ternyata beberapa indikator kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Tengah dapat meningkat, akan tetapi belum sepenuhnya optimal jika dibandingkan dengan target indikator yang ditetapkan dalam RPJMD (Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014). Sementara, beberapa indikator kesejahteraan masyarakat justru mengalami penurunan yang berarti tidak sesuai dengan harapan. Hal tersebut berdasarkan kenyataan banyaknya indikator kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang tidak tercapai, sebagai berikut:

- IPM dengan target RPJMD tahun 2014 sebesar 74,24 ternyata tercapai 68,78 artinya cita-cita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum tercapai sesuai dengan target RPJMD.
- Pertumbuhan PDRB dengan target RPJMD tahun 2014 sebesar 5,9% - 6,4% ternyata tercapai 5,3% dan target RPJMD tahun 2015 sebesar 6.0% - 6.5% ternyata tercapai 5,4%, artinya cita-cita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah belum tercapai sesuai target RPJMD.
- Penduduk Miskin dengan target RPJMD tahun 2014 sebesar 11,58% - 11,37% ternyata tercapai 14,46% dan target RPJMD tahun 2015 sebesar 9,05% - 8,75% ternyata tercapai 13,58% artinya cita-cita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menurunkan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah belum tercapai sesuai target RPJMD.

- Tingkat Pengangguran Terbuka, target RPJMD tahun 2014 sebesar 5,31% - 4,77% ternyata realisasinya 5,7% dan target RPJMD tahun 2015 sebesar 4,93% - 4,62% ternyata tercapai 5,0% artinya cita-cita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menurunkan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah belum tercapai sesuai target RPJMD.
- Kesenjangan Pendapatan (indeks Gini) dengan terget RPJMD tahun 2014 sebesar 0,349 ternyata tercapai 0,38 dan target tahun 2015 sebesar 0,347 ternyata tercapai 0,38 cita-cita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menurunkan tingkat kesejangan di Provinsi Jawa Tengah belum tercapai sesuai target RPJMD.
- Nilai Tukar Petani, dengan target RPJMD tahun 2014 sebesar 102,04 ternyata tercapai 100,65 dan target tahun 2015 sebesar 102,36 ternyata tercapai 100,24 cita-cita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Provinsi Jawa Tengah belum tercapai sesuai target RPJMD.

Gambaran capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bidang kesejahteraan masyarakat dalam periode 6 (enam) tahun tercermin pada Tabel 1.5.

**Tabel 1.5**  
**Capain Indikator Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun**  
**2010 – 2015**

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	IPM	-	66,08	66,64	67,21	68,02	68,78	x
2	Pertumbuhan PDRB <sup>4)</sup>	%	6,1	5,3	5,3	5,1	5,3 <sup>*)</sup>	5,4 <sup>**)</sup>
3	Laju Inflasi	%	6,88	2,68	4,24	7,99	8,22	2,73 <sup>5)</sup>
4	PDRB Perkapita	Ribu Rupiah	19.209,3	21.162,8	22.865,4	24.952,2	27.599,1 <sup>*)</sup>	30.025,2 <sup>**)</sup>
5	Indeks Gini	-	0,34	0,38	0,38	0,39	0,38	0,38
6	Indeks Wiliamson	-	0,6531	0,6395	0,6356	0,6305 <sup>*)</sup>	0,6272 <sup>**)</sup>	x
7	Penduduk Miskin	%	16,56	16,20	14,98	14,44	13,58	13,32
8	Indeks Pembangunan Gender (IPG) <sup>3)</sup>	-	90,32	90,92	91,12	91,50	91,89	x
9	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	67,96	68,99	69,06	71,22	74,46	x
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,2	7,1 <sup>1)</sup>	5,6 <sup>1)</sup>	6,0 <sup>1)</sup>	5,7 <sup>2)</sup>	5,0
11	Nilai Tukar Petani	-	101,62	104,84	105,35	105,90	100,65 <sup>7)</sup>	100,24 <sup>8)</sup>

Keterangan :

- 1). Hasil backasting penimbang Proyeksi Penduduk Februari 2014.
  - 2). Mulai 2014 menggunakan penimbang Proyeksi Penduduk Februari 2014.
  - 3). Menggunakan Metode Baru.
  - 4). Menggunakan Tahun Dasar 2010=100.
  - 5). Inflasi Thn Kalender Desember.
  - 6). Angka ramalan II (ARAM II)
  - 7). Mulai Des 2013 menggunakan Thn Dsr 2012=100
  - 8). Data Januari-Desember 2015
- x = data belum tersedia  
\*) angka sementara  
\*\*) angka sangat sementara

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah - Beberapa Indikator Makro Sosial Ekonomi Jawa Tengah Edisi Januari 2016

Sesuai dengan kaidah sistem perencanaan pembangunan nasional (UU Nomor 25 Tahun 2004), berdasarkan visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari (*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*)’ yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian dijabarkan ke dalam misi, rencana strategis, rencana kerja, kebijakan daerah, program dan kegiatan-kegiatan. Atas dasar itu, kapasitas fiskal yang ada dalam APBD setiap tahunnya dialokasikan dan didistribusikan ke dalam program-program dan kegiatan-kegiatan.

Menurut Adrianto (2011) dengan jumlah anggaran belanja dalam setiap unit kerja terus mengalami kenaikan. Banyak masyarakat merasa tidak puas dengan kinerja Pemerintah Daerah karena merasa tidak mendapatkan kesejahteraan yang mereka inginkan. Disamping itu banyak keluhan bagaimana pengalokasian anggaran di daerah. Selain itu jika mengacu pada capaian yang diraih pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibandingkan RPJMD maupun Provinsi-Provinsi Tetangga di Pulau Jawa masih menunjukkan hasil yang belum memuaskan sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk melihat kondisi maupun tantangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mirza (2012) tentang Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. Diperoleh hasil bahwa variabel kemiskinan mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap IPM. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi dan belanja modal mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap IPM. Selanjutnya dalam penelitian

Brata (2002) tentang Pembangunan Manusia dan PDRB di Indonesia memperoleh hasil bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbukti sangat signifikan pengaruhnya terhadap tingkat pembangunan yang dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan latar belakang di atas, akan dilakukan penelitian yaitu pengaruh alokasi belanja modal, kemiskinan, dan PDRB terhadap kesejahteraan masyarakat yang mencakup Kabupaten dan Kota Jawa Tengah serta evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mensejahterakan masyarakat. Penelitian terhadap pengaruh alokasi belanja modal, kemiskinan, dan PDRB terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM) dilakukan dengan data dari Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk tahun 2010 – 2014. Sedangkan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mensejahterakan masyarakat dibatasi hanya untuk studi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 – 2015 (tidak termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak hanya dilihat berapa besar tingkat *Gross Domestic Bruto*, namun juga memperhatikan sejauh mana peningkatan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan di daerah tersebut. Salah satu bentuk keberhasilan atau peningkatan kesejahteraan dapat dilihat dari tingkat pembangunan manusia di suatu daerah. Sehingga dalam upaya meningkatkan tingkat pembangunan manusia perlu keseriusan pemerintah dalam menangani hal tersebut. Salah satu bukti keseriusan pemerintah tersebut adalah

lewat pengeluaran pemerintah yang merupakan bentuk konkrit pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.

Dalam meraih visi **Menuju Jawa Tengah Sejahtera**, Provinsi Jawa Tengah masih menghadapi beberapa permasalahan diantaranya belum tercapainya indikator-indikator kesejahteraan masyarakat dalam RPJMD dan masih rendahnya capaian tersebut dibandingkan nasional dan provinsi di Pulau Jawa. Padahal dengan berhasilnya pemerintah meningkatkan indikator-indikator kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pada kenyataan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh dari alokasi belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat?
3. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat?
4. Bagaimana kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (APBD) apakah telah berkesesuaian dan konsisten dengan visi-nya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
5. Bagaimana capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam meraih target indikator-indikator kesejahteraan masyarakat (IPM, pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB perkapita, indeks gini,

penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, dan nilai tukar petani)?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dan kegunaan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui apa yang hendak dicapai dan manfaat yang diperoleh dengan adanya penelitian ini.

#### **1.3.1. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Menganalisis pengaruh alokasi belanja modal Kabupaten/Kota di Jawa Tengah terhadap kesejahteraan masyarakat
2. Menganalisis pengaruh kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah terhadap kesejahteraan masyarakat
3. Menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah terhadap kesejahteraan masyarakat.
4. Mengevaluasi kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam meraih visi-nya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengevaluasi capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam meraih indikator-indikator kesejahteraan masyarakat (IPM, pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB perkapita, indeks gini, penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, dan nilai tukar petani).

### **1.3.2 Kegunaan**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan praktis adalah sebagai informasi dan masukan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang serta menjadi referensi.
2. Kegunaan ilmiah untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu ekonomi pembangunan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

#### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

#### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis, yang didukung dengan penelitian terdahulu. Kerangka pemikiran teoritis menjelaskan permasalahan yang diteliti yaitu tentang apa yang seharusnya, sehingga timbul adanya hipotesis (dugaan awal penelitian).

#### **Bab III : Metode Penelitian**

Bab ini berisi metode penelitian yang meliputi variabel penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian

#### **Bab IV : Hasil dan Pembahasan**

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, hasil dari analisis data, interpretasi dan pembahasan.

### **Bab V : Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan.